MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor. 9 – 13, Telepon (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

SURAT TUGAS
NOMOR: 96/BUA.UKPBJ/ST/VII/2025

Menimbang : a. bahwa yang namanya tercantum dalam surat tugas ini, dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud;
b. bahwa yang tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 di Pengadilan Negeri Dobo.

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4A/SEK/SK.PL1.1/I/2025 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Surat Ketua Pokja Pemilihan Nomor 05/UKPBJ/ST-Pokja/JK-PN.DOBO/VII/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Permohonan Penerbitan Surat Tugas Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA).

MENUGASKAN:

Kepada:

No	Nama dan NIP	Jabatan dan Satuan Kerja	Gol
1	Septarina Ardina Wati 19900511 201503 2 002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, Biro Umum	III
2	Syaifullah Nur 19990814 202321 1 001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, Biro Perlengkapan	IX
3	Aid Fauzan 19820729 202321 1 018	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, Kepaniteraan	IX
4	Fiqky Yofhani 19890210 202321 1 015	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	IX

untuk : melaksanakan tugas dalam rangka evaluasi dan pembuktian kualifikasi pekerjaan jasa konstruksi sarana lingkungan pada Pengadilan Negeri Dobo Tahun 2025.
tanggal : 7 s.d. 9 Juli 2025.
tujuan : Wilayah Provinsi Bali.

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Pengadilan Negeri Dobo Tahun Anggaran 2025, dengan akun 1071.EBB.971.0A.533111.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 4 Juli 2025

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Mahkamah Agung RI

Sahwan